

Kritik di Negara Demokrasi:

Demokrasi dan Kebenaran

Diskusi ke-20 Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik

LP3ES

Otto Gusti Madung

(Dosen di STFK LEDALERO, Maumere, Flores)

Pendahuluan

Dalam diskusi tentang “Kritik di Negara Demokrasi” ini, saya ingin membahas tema tentang “Demokrasi dan Kebenaran”. Pertanyaan yang akan dijawab ialah apakah diskursus atau deliberasi publik di negara demokrasi hanya merupakan ekspresi kepentingan-kepentingan ekonomis (*homo economicus* – libertarian), kepentingan identitas sektarian atau kepentingan kelas semata, atau memiliki basis epistemologis yang riil, dalam arti berpijak pada fakta empiris dan acuan normatif (etis/moral) yang harus ditaati?

Saya berpandangan, dengan menggunakan model konsep *demokrasi deliberatif*, bahwa diskursus publik di dalam demokrasi berpijak pada kebenaran karena argumentasi yang dibangun di ruang publik harus berpijak pada fakta (melawan hoax) dan memiliki titik pijak normatif (hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, antidiskriminasi, keadilan sosial).

Uraian ini dibagi ke dalam beberapa bagian:

- **Beberapa Kisah tentang Kritik**
- **Penolakan terhadap Kebenaran dalam Demokrasi:**
 - **Paradigma Libertarian/Neoliberal**
 - **Paradigma Politik Identitas**
- **Demokrasi Deliberatif dan Kebenaran**

1. Fakta tentang Kritik di Indonesia

- **Jokowi di Sikka**

Pada hari Rabu, 24 Februari lalu Presiden Jokowi mengunjungi dua kabupaten di Provinsi NTT yakni Sumba Tengah dan Sikka. Kedatangannya bertujuan untuk

meresmikan dua buah wadug besar yang dibangun pada masa pemerintahannya. Ketika tiba di Maumere, Kabupaten Sikka presiden disambut massa spontan yang pada umumnya tidak mematuhi protokol Kesehatan.

Merespons peristiwa tersebut, Politikus Partai Demokrat dari Dapil NTT I, Benny K Harman menilai bahwa Jokowi melanggar aturan protokol kesehatan (prokes) yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan.

Ini kutipan langsung dari Pak Benny: "Secara hukum, Presiden jelas kasat mata melanggar aturan prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa ini juga memperlihatkan masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar Covid-19 hanya untuk melihat pemimpin yang mereka cintai" (Bdk. Kompas.com 24/2/2021).

Saya berpendapat bahwa kritik apa yang disampaikan oleh Pak Benny sudah sesuai dengan fakta di lapangan, dan kritik itu sah-sah saja dalam sebuah negara demokratis. Menyampaikan kritik adalah tugasnya sebagai oposisi dan demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi guna mengontrol kekuasaan. Sebab, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (Lord Acton).

Namun reaksi publik media sosial sangat negatif terhadap kritik tersebut. Ada yang mengatakan bahwa BKH telah melukai perasaan rakyat NTT yang sangat mencintai Jokowi. Kritikan itu lahir dari rasa iri, dengki dan benci terhadap Jokowi yang sudah sangat memperhatikan rakyat NTT. Di sini kita lihat bagaimana diskusi tentang fakta berubah menjadi reaksi emosional atau sentimen *like* dan *dislike*.

- **Jokowi Minta Dikritik**

Saya sangat gembira beberapa waktu lalu ketika Jokowi meminta rakyat lebih aktif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menghindari maladministrasi. Kritik akan membentuk opini publik yang dapat dijadikan acuan bagi kerja pemerintah.

Juga rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) saya pandang sebagai sesuatu yang positif untuk perkembangan demokrasi kita, di tengah menurunnya indeks demokrasi kita. Menurut aporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada level terendah dalam 14 tahun terakhir dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori demokrasi cacat (*flawed democracy*).

Akan tetapi, harapan yang dihembuskan oleh pemerintah ini telah disambut dengan nada pesimisme oleh warga. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ([LP3ES](#)) melakukan riset di media sosial dan menemukan

126.970 percakapan internet seputar permintaan kritik dari Jokowi. 44% menyampaikan sentimen negatif atas pernyataan presiden tersebut (<https://barisan.co/riset-lp3es-netizen-meragukan-permintaan-kritik-jokowi/?amp>).

2. Negasi atas Kebenaran

Kebebasan berpendapat merupakan unsur esensial dalam demokrasi. Demokrasi mengandaikan partisipasi dan deliberasi publik dalam penyusunan regulasi dan mekanisme kontrol terhadap pemerintah. Proses deliberasi publik tersebut mengandaikan adanya pertukaran argumentasi yang berpijak pada kebenaran fakta empiris dan normatif. Seluruh proses ini hanya mungkin terjadi dalam kebebasan.

Tanpa titik pijak kebenaran, deliberasi publik tidak lebih dari ekspresi kepentingan ekonomi, identitas sektarian dan pertarungan kelas. Akan tetapi dewasa ini ada dua pandangan yang menolak dimensi epistemologis deliberasi demokratis.

Pertama, anggapan kaum libertarian atau neoliberal bahwa debat politik hanya menciptakan kegaduhan, karena itu harus ditransformasi dan dikendalikan oleh rasionalitas ekonomi. Paradigma libertarian menggantikan politik dengan pasar (Julian Nida-Rümelin, 2020). Hukum berperan untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik.

Kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menghindari “kegaduhan” demi iklim investasi yang kondusif sesungguhnya merupakan ekspresi netralisasi negara dan tindakan politik oleh kekuatan pasar. Hal ini tak jarang berujung pada aksi represif aparat keamanan terhadap masyarakat sipil dengan menggunakan UU ITE.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) melaporkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2021 UU ITE telah menjerat 375 warganet (Kompas, 23/02/2021). Sulit untuk percaya bahwa pemerintah tidak melakukan *abuse of power* dalam penerapan UU ITE. Sebab mayoritas korban penerapan pasal karet undang-undang ini adalah jurnalis, aktivis, dan warga kritis yang selalu menyuarakan kritik terhadap kekuasaan. Masih segar dalam memori publik kasus yang menimpa peneliti independen kebijakan publik, Rasio Patra. Rasio dikenal getol mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia akhirnya ditangkap polisi setelah satu hari sebelumnya *WhatsApp* Rasio dibajak.

Akan tetapi maraknya fundamentalisme agama beberapa tahun terakhir dan menguatnya fenomena populisme kanan dewasa ini merupakan bentuk kekuatan politik antagonis terhadap dominasi neoliberalisme dalam politik. Lebih jauh, paradigma libertarian juga menggunakan pendekatan positivisme hukum untuk membenarkan dominasi pasar di ranah politik dan mengabaikan proses deliberasi publik atau partisipasi *demos* sebagai basis legitimasi normatif keberlakuan undang-

undang atau produk hukum lainnya. Revisi UU KPK dan pembuatan UU Omnibus Law adalah contoh pengabaian partisipasi publik yang didukung oleh tindakan represi negara terhadap para aktivis, mahasiswa dan akademisi yang kritis terhadap kekuasaan.

Kedua, paradigma politik identitas. Di sini corak deliberatif diskursus politik dipandang sebagai kamufase untuk menutupi kepentingan-kepentingan identitas sektarian. Polarisasi radikal antara pendukung dan kelompok oposisi terhadap Jokowi, pengerahan *buzzer* di ruang publik telah memperkuat fragmentasi politik berbasis identitas. Akibatnya, argumentasi politik tidak lagi berpijak pada fakta empiris dan rujukan normatif, tapi pada sentimen *like* dan *dislike*.

3. Demokrasi Deliberatif dan Kebenaran

Setiap kebenaran dalam tatanan sosial selalu berbenturan dan berkompetisi dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Maka relasi kebenaran dengan kekuasaan selalu memicu perdebatan. Di satu sisi setiap kebenaran mengklaim absolutisme dalam tafsiran tentang dunia dan relasi manusia dengan dunia. Di sisi lain pluralitas kebenaran justru mencegah adanya kecenderungan monopoli klaim kebenaran tersebut yang melahirkan totalitarianisme. Bahkan idealisme kebenaran normatif seperti faham universal hak-hak asasi manusia misalnya harus berkompetisi dengan pandangan normatif tatanan global lainnya.

Untuk menghindari absolutisme dan merawat pluralitas kebenaran, iklim kebebasan berpendapat harus dijamin di dalam demokrasi. Sebab tanpa kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers, demokrasi akan mati (Kompas 23/02/2021). Tanpa kebebasan berekspresi tidak mungkin terbentuk opini publik yang merupakan jantung demokrasi. Pemerintah seharusnya tidak perlu takut dengan rakyatnya yang secara terbuka mengungkapkan ke publik kebenaran dan kebohongan dalam penyelenggaraan negara.

2500 tahun silam seorang filsuf Yunani Kuno, Plato (424 BC- 348 BC), mengutuk kebohongan politik dan menekankan urgensi kebenaran. Dalam *Republik*, Plato menulis, "Jika para filsuf tidak menjadi raja di negara-negara atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar dan keduanya yakni filsafat dan kekuasaan negara tak berkelindan satu sama lain, maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia" (Republik, 473c-d).

Awasan Plato tidak keliru. Menguatnya politik identitas dan tampilnya pemimpin populis yang menyebar kebohongan dan memanipulasi kebencian rakyat demi dukungan elektoral adalah musibah yang tengah melanda umat manusia. Musibah datang ketika politik dusta merebak dan kebenaran dijauhi dari arena politik.

Saatnya politik kembali kepada kebenaran. Plato tidak saja menganjurkan agar para pemimpin tunduk pada kebenaran, tapi juga taat pada prinsip kesejahteraan umum. Untuk itu seorang pemimpin perlu dibekali dengan “daya penilaian” yang diperolehnya dalam proses belajar filsafat yang panjang.

Di dalam demokrasi proses belajar berarti mendengarkan suara rakyat. Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang bagi warga negara untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas proses pembuatan regulasi dan tindakan eksekutif.

Formasi deliberasi publik ini membutuhkan kerja sama antara politik, media massa dan masyarakat sipil. Dari pihak politik dituntut transparansi tingkat tinggi dan kewajiban menyampaikan argumentasi publik rasional untuk setiap kebijakan. Pengerahan *buzzer* adalah racun bagi ruang publik, memperkuat fenomena *echo chambers* dan polarisasi diskursus publik. Kontribusi media massa ialah menyediakan *platform* diskusi bagi masyarakat luas serta tidak membiarkan pandangannya diinstrumentalisasi untuk kepentingan kekuasaan. Sementara itu masyarakat sipil dituntut untuk menaruh minat dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik.

Seperti sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, para penganut libertarian menolak diskursus tentang kebenaran dalam demokrasi guna menghindari konflik dalam masyarakat plural. Pandangan ini keliru. Konsep kebenaran yang dimaksudkan libertarianisme adalah kebenaran sebagai kepastian fundamental. Sebuah fundamentalisme epistemologis yang menolak ruang bagi diskursus dan pluralitas pandangan. Sebaliknya, kebenaran yang dimaksud dalam demokrasi deliberatif adalah kebenaran yang berpijak pada epistemologi falibilisme.¹ Sebuah epistemologi yang tidak pernah melahirkan jawaban final tapi selalu terbuka untuk perdebatan baru.

Epistemologi falibilisme bersifat inklusif. Ia melibatkan semua yang mampu menjelaskan sebuah persoalan dalam deliberasi publik. Proses diskursus dan pencarian argumentasi tandingan pada prinsipnya tidak mengenal batas-batas regional, etnis dan kultural. Sedangkan praksis diskursus politis harus mengakui batas-batas tertentu. Namun itu tidak berarti keduanya berada pada relasi kontradiktoris.

Lebih jauh, epistemologi falibilisme berkelindan erat dengan konsep *toleransi sebagai respek*. Artinya, saya juga mengakui sebuah argumentasi kendatipun argumentasi itu tidak sesuai dengan penilaian-penilaian yang saya yakini benar. Itulah paradoks realisme keyakinan dunia kehidupan kita yang merasap masuk hingga ke dalam

¹ Bdk. Julian Nida-Rümelin, *Demokratie und Wahrheit*, hlm. 45

politik dan ilmu pengetahuan. Realisme tersebut menuntut adanya epistemologi falibilisme serta pengakuan orientasi nilai toleransi dan inklusi. Bersikap kritis (skeptis) terhadap keyakinan sendiri dan menaruh respek terhadap pandangan yang berseberangan merupakan aspek esensial dari etos ilmu pengetahuan modern. Dalam sebuah masyarakat modern yang berorientasi pada nilai-nilai pencerahan (*Aufklärung*) etos ini berurat akar di dalam praksis komunikasi dunia kehidupan dan membentuk komunikasi politik. Falibilisme mendorong toleransi, sedangkan fundamentalisme kebenaran menciptakan intoleransi. Transformasi argumentasi menuju indikator kepentingan tidak akan menciptakan perdamaian, tapi sebaliknya mengubah deliberasi menjadi pertarungan kekuasaan ekonomi.

Kendatipun demikian terdapat perbedaan mendasar antara diskursus ilmu pengetahuan dan perdebatan politik. *Pertama* berkaitan penerapan prinsip inklusivitas. Praksis komunikasi ilmu pengetahuan bersifat inklusif karena ilmu pengetahuan tidak mengeksklusi manusia karena alasan daerah asal, latar belakang tradisi dan budaya. Namun ilmu pengetahuan juga bersifat eksklusif karena ia menggunakan bahasa khas dan metode yang menuntut pendidikan dan *expertise* khusus. *Kedua*, praksis diskursus ilmu pengetahuan berorientasi pada spesialisasi. Kemungkinan rasionalisasi lewat jalur spesialisasi dan penajaman metode tidak dijumpai di dalam diskursus politik publik. Diskursus politik tidak menggantungkan kejelasannya pada perihal *expertise*. Sedangkan bahasa politik selalu berada pada ketegangan antara bahasa populisme vulgar tapi mudah dipahami di satu sisi, dan keketatan ilmiah tapi kehilangan aspek publisitas di sisi lain. Kebolehan praksis politik dalam demokrasi modern justru terletak pada kemampuan untuk mempertahankan dan merumuskan secara baru ketegangan tersebut. Demikianpun argumentasi ilmu pengetahuan sejauh itu relevan secara politis harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Ilmu pengetahuan hanya dapat memainkan peran yang memberikan orientasi bagi politik sejauh ia berkiblat pada penggunaan nalar publik.

Penutup

Kembali ke Plato. Plato menganjurkan filsuf menjadi pemimpin atau raja. Dalam era demokrasi hal ini tidak mungkin lagi. Tapi demokrasi membuka ruang untuk menciptakan pemimpin yang adalah filsuf: memiliki integritas moral, kompetensi kepemimpinan dan dukungan demokratis. Di sini kritik menjadi penting. Tugas kritik sama seperti tugas filsafat menurut Slavoj Žižek yakni sebagai *Unruhestifter* – pencipta kegaduhan. Peran ini sudah dihayati oleh filsafat sejak zaman Sokrates, yakni: “to corrupt the youth, to alienate (or, rather, ‘extraneate’ in the sense of Brecht’s *verfremden*) them from the predominant ideologico-political order, to sow radical doubts and enable them to think autonomously” - “Mengguncang pikiran

generasi muda, menjauhkan mereka dari tatanan politik ideologi *mainstream*, menabur keraguan radikal dan memampukan mereka untuk berpikir mandiri".²

² Bdk. Slavoj Žižek, *Like a Thief in Broad Daylight: Power in the Era of Post-Humanity*, Allen Lane 2018, hlm. 6